

**Analisis Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2013-2023**

Dessy Fitrahtul Hanif<sup>1</sup>, Sarwo Edy Handoyo<sup>2</sup>  
Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: dessy.126231101@stu.untar.ac.id, sarwoh@fe.untar.ac.id

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2013 – 2023. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan menganalisis perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 serta kontribusi perolehan PAD terhadap Pendapatan Daerah, selanjutnya analisis perkembangan perolehan Pendapatan Transfer Kabupaten Mamuju serta proporsi perolehannya terhadap Pendapatan Daerah dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 guna mengetahui tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintahan lain (pusat maupun provinsi), kemudian melakukan penghitungan nilai Indeks Kemandirian Fiskal dan mengklasifikasikan hasil perhitungan. Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam 10 tahun terakhir yaitu 2013-2023 termasuk dalam klasifikasi “Belum Mandiri” dengan rata-rata nilai sebesar 0,0705. Analisis atas tren IKF, terdapat fluktuasi nilai IKF pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, namun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tren menunjukkan peningkatan atau positif. Faktor-faktor yang menjadi penghambat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju adalah kurangnya perolehan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tingginya tingkat ketergantungan pendapatan transfer.

**Kata Kunci:** Keuangan Daerah; Kemandirian Keuangan; PAD; Pendapatan Transfer

---

**Abstract**

*This research aims to assess the financial independence of the Mamuju Regency Government and determine the factors that influence it. This research uses Mamuju Regency Regional Government Financial Report data for 2013 - 2023. The research method uses a qualitative case study approach by analyzing the development of Regional Original Income (PAD) Mamuju Regency acquisition from 2013 to 2023 as well as the contribution of PAD acquisition to Regional Income, then analyzing the development of Regency Transfer Income acquisition Mamuju and the proportion of its revenues to Regional Revenue from 2013 to 2023 in order to determine the level of dependence on funds from other governments (central and provincial), then calculate the Fiscal Independence Index value and classify the calculation results. The financial independence of the Mamuju District Government in the last 10 years, namely 2013-2023, is included in the "Not Yet Independent" classification with an average value of 0.0705. Analysis of the IKF trend, there are fluctuations in the IKF value in the Mamuju Regency Regional Government, but in the last three years, the trend shows an increase or is positive.*

*Factors that hinder regional financial independence in the Regional Government of Mamuju Regency are the lack of acquisition of Regional Original Income (PAD) and the high level of dependence on central transfer income.*

**Keywords:** *Regional Finance; Financial autonomy; PAD; Transfer Income*

## PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan peraturan perundang-undangan mengatur ketentuan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan kewenangan otonomi daerah yang bertujuan agar pelaksanaan pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintah daerah dapat meningkat serta sebagai upaya meningkatkan stabilitas politik dan persatuan bangsa. Handoko (2021) keberlangsungan merupakan hal yang penting terutama dalam hal keberlanjutan. Sesuai dengan azas desentralisasi, daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat termasuk didalamnya urusan pengelolaan keuangan. Halim (2001) menjelaskan bahwa suatu daerah dikatakan mampu mencapai otonomi yaitu jika memiliki kapasitas perekonomian daerah, yang berarti bahwa daerah tersebut harus mempunyai otoritas atau kewenangan dan kapabilitas untuk mengumpulkan sumber daya ekonomi yang dimiliki, mengelola dan menggunakan perkonomiannya untuk pendanaan kegiatan pemerintahannya, dan ketergantungan terhadap bantuan pusat diminimalkan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian terbesar sumber perkonomian sehingga dapat meningkatkan peran pemerintah daerah.

Pemindahan ibu kota negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memberikan dampak signifikan pada daerah sekitarnya dengan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai kabupaten yang berada disekitar ibu kota baru, Kabupaten Mamuju yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat, menjadi salah satu kabupaten yang menjadi peyangga IKN. Potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan adanya investasi baru dan peningkatan aktivitas bisnis sebagai dampak dari pemindahan ibu kota negara mendorong kabupaten Mamuju dalam meningkatkan kemandiriannya dalam hal keuangan. Kabupaten Mamuju, sebagai subjek studi, tentunya menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian keuangannya terutama terkait tingkat ketergantungan dana yang diterima dari pemerintah pusat dan pengelolaan pendapatan asli daerahnya. Kondisi perekonomian pada Kabupaten Mamuju yang selama sepuluh tahun terakhir mengalami perubahan yang signifikan akibat adanya resesi, pandemi Covid-19, bencana gempa bumi, serta pemindahan ibu kota negara.

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dan merupakan provinsi paling barat di Pulau Sulawesi. Terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 2004, untuk kemudian Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai ibu kota provinsi tersebut. Pada tahun 2020, BPK RI melaksanakan penilaian terhadap kemandirian keuangan pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia dan ditemukan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih belum mandiri. Hasil audit memperlihatkan bahwa pada tahun anggaran 2019, terdapat 458 dari 497 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori belum mandiri, di mana salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan analisis lebih dalam untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju terkait dengan perkembangan kemandirian keuangan selama sepuluh tahun terakhir. Untuk melihat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju, akan dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dengan

melihat indikator tingkat ketergantungan pada pendapatan transfer serta pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

- a. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju
- b. Perkembangan pendapatan transfer pusat guna membiaya kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju
- c. Perkembangan indeks kemandirian fiskal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
- d. Pengaruh perolehan PAD dan Pendapatan Transfer Dana Pusat terhadap kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus yang menitikberatkan pada analisa hasil pengolahan data. Herdiansyah (2015) menjelaskan penelitian studi kasus merupakan penelitian yang bersifat komprehensif, intens, merinci, mendalam, sebagai upaya untuk menelaah masalah atau fenomena yang memiliki batas waktu tertentu. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah eksplanatif yang menjelaskan hasil data dalam bentuk analisa dan penjabaran kondisi.

### **Populasi dan Teknik Penentuan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju. Kemudian, untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 (10 Tahun terakhir). Hal ini sesuai dengan metode penentuan sampel pada penelitian ini yang menggunakan purposive sampling, yaitu metode penarikan sampel yang merujuk pada kesesuaian data sampel dengan tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah tersebut selama 10 tahun terakhir.

### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan jenis time series. Di mana analisis data sekunder dilakukan dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari data yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang kemudian diolah secara sistematis.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni melakukan Analisa perkembangan perolehan PAD Kabupaten Mamuju dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 serta kontribusi perolehan PAD terhadap Pendapatan Daerah, selanjutnya Analisa perkembangan perolehan Pendapatan Transfer Kabupaten Mamuju serta proporsi perolehannya terhadap Pendapatan Daerah dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 guna mengetahui tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintahan lain (pusat maupun provinsi), kemudian melakukan penghitungan nilai Indeks Kemandirian Fiskal dan mengklasifikasikan hasil perhitungan tersebut sesuai dengan tabel 2.1 Klasifikasi IKF, selain itu hasil perhitungan indeks tersebut juga akan dikaitkan dengan perolehan PAD dan Pendapatan Transfer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Pengumpulan dan Perhitungan Data**

Data yang digunakan dalam penerlitan ini bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2013-2023 yang telah diaudit oleh BPK. Data PAD, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Daerah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan nilai relalisasi pendapatan pada Laporan Relalisasi Anggaran di LKPD Kabupaten Mamuju. Sedangkan untuk Formula IKF yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IKF = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{REVOR + TrGP + TrSP + B + REVSH}$$

Keterangan :

- IKF : Index Kemandirian Fiskal
- REVOR : Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- TrGP : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)
- TrSP : Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
- B : Subnational Borrowing (Penerimaan Pinjaman Daerah)
- REVSH : Dana Bagi Hasil yang terdiri atas:  
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);  
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21;  
DBH cukai yang bersumber dari cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
DBH sumber daya alam.

Hasil pengumpulan data serta perhitungan nilai IKF yang akan dibahas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1** Hasil Pengumpulan Data serta Perhitungan Nilai IKF Kabupaten Mamuju TA 2013-2023

Tahun Anggaran	PAD	Pendapatan transfer	Total Pendapatan	IKF	Klasifikasi Kemandirian
2013	31.144.602.951,00	740.101.979.897,00	838.719.310.145,23	0,04038	Belum Mandiri
2014	55.539.367.583,41	559.802.348.455,00	693.532.478.935,41	0,09026	Belum Mandiri
2015	58.825.603.892,07	855.702.708.054,00	914.528.311.946,07	0,06432	Belum Mandiri
2016	66.800.589.252,87	989.895.687.316,73	1.058.332.923.221,60	0,06322	Belum Mandiri

Tahun Anggaran	PAD	Pendapatan transfer	Total Pendapatan	IKF	Klasifikasi Kemandirian
2017	74.023.409.603,06	969.429.846.295,08	1.087.434.107.522,14	0,07094	Belum Mandiri
2018	75.433.707.053,44	973.204.789.242,93	1.090.319.370.020,37	0,07193	Belum Mandiri
2019	80.120.391.427,47	996.134.980.759,26	1.125.649.491.486,73	0,07444	Belum Mandiri
2020	72.705.099.969,88	909.278.952.540,00	1.035.060.933.751,88	0,07404	Belum Mandiri
2021	58.591.847.149,34	930.841.852.567,00	1.036.178.099.032,34	0,05922	Belum Mandiri
2022	75.894.965.379,88	959.001.280.743,00	1.076.255.034.975,88	0,07334	Belum Mandiri
2023	101.606.766.593,90	1.046.739.513.501,00	1.196.988.838.933,90	0,08848	Belum Mandiri
<b>Rata Rata</b>				<b>0,07005</b>	Belum Mandiri

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun sepuluh tahun terakhir kondisi kemandirian keuangan kabupaten mamaju masih masuk kedalam kriteria belum mandiri dimana nilai IKF rata-rata yang diperoleh sebesar 0,07005. Penjelasan mengenai masing-masing item pada tabel diatas diuraikan pada subbab pembahasan.

#### **Pembahasan**

##### **a. PAD dan Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju**

Perolehan PAD dan proporsinya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju periode tahun 2013 – 2023 berdasarkan realisasi yang tertera pada Laporan Keuangan ditunjukkan pada Tabel berikut:

**Tabel 4.2** Realisasi PAD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2013 – 2023

No	Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Proporsi PAD
1	2013	31.144.602.951,00	838.719.310.145,23	3,71%
2	2014	55.539.367.583,41	693.532.478.935,41	8,01%
3	2015	58.825.603.892,07	914.528.311.946,07	6,43%
4	2016	66.800.589.252,87	1.058.332.923.221,60	6,31%
5	2017	74.023.409.603,06	1.087.434.107.522,14	6,81%
6	2018	75.433.707.053,44	1.090.319.370.020,37	6,92%
7	2019	80.120.391.427,47	1.125.649.491.486,73	7,12%
8	2020	72.705.099.969,88	1.035.060.933.751,88	7,02%
9	2021	58.591.847.149,34	1.036.178.099.032,34	5,65%

No	Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Proporsi PAD
10	2022	75.894.965.379,88	1.076.255.034.975,88	7,05%
11	2023	101.606.766.593,90	1.196.988.838.933,90	8,49%
<b>Rata-rata</b>		<b>68.244.213.714,21</b>	<b>1.013.908.990.906,50</b>	<b>6,68%</b>

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan perkembangan perlolaan PAD Kabupaten Mamuju cenderung mengalami peningkatan, penurunan terjadi pada tahun 2020 yang kemungkinan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dan makin menurun di tahun 2021 yang dikarenakan pada tahun tersebut Kabupaten Mamuju mengalami bencana alam berupa gempa bumi, namun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat kembali ke jalur peningkatan PAD kembali. Meskipun perolehan PAD Kabupaten Mamuju menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan dengan perolehan Pendapatan Daerah Mamuju masih terhitung sangat kecil, dimana dari rata-rata tahun 2013 -2023 perolehan PAD sebesar Rp68.244.213.714,21 dengan proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah hanya sebesar 6,68%, hal ini menandakan bahwa kontribusi PAD yang diperoleh dan diupayakan sendiri perolehannya oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju masih sangat kecil. Proporsi yang sangat kecil tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Mamuju belum sepenuhnya optimal dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintahannya.

#### **b. Pendapatan Transfer dan Ketergantungan Fiskal Daerah**

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017). Pendapatan Transfer terbesar yakni transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Besarnya transfer dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat cenderung memberikan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan fiskal ini dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Semakin besar nilai yang didapat maka semakin besar pula suatu pemerintah daerah tergantung dengan dana dari pusat. Perolehan pendapatan transfer pada Pemerintah Kabupaten Mamuju serta nilai persentase proporsinya terhadap pendapatan daerah ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.3** PAD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2013 – 2023

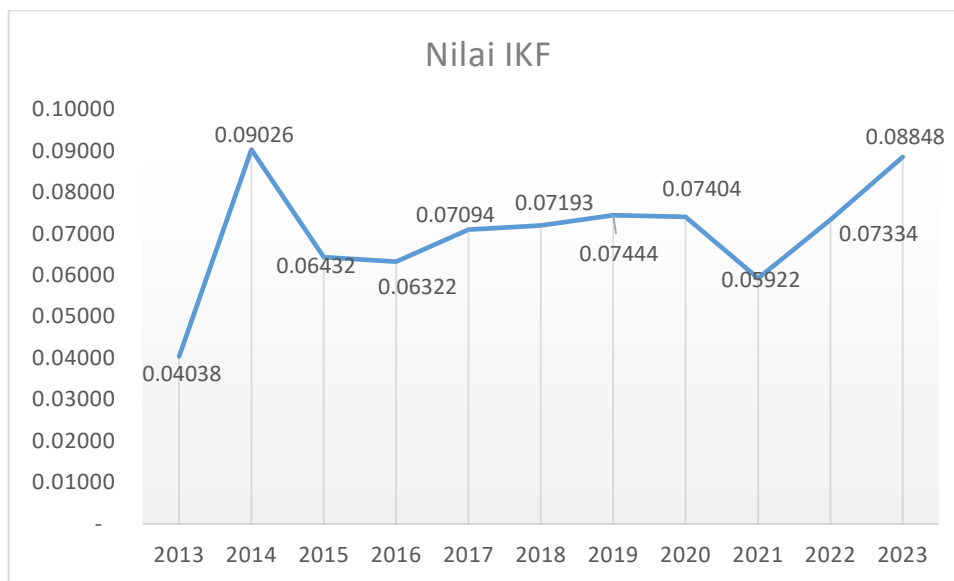
No	Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Proporsi Pendapatan Transfer
1	2013	740.101.979.897,00	838.719.310.145,23	88,24%
2	2014	559.802.348.455,00	693.532.478.935,41	80,72%
3	2015	855.702.708.054,00	914.528.311.946,07	93,57%
4	2016	989.895.687.316,73	1.058.332.923.221,60	93,53%
5	2017	969.429.846.295,08	1.087.434.107.522,14	89,15%
6	2018	973.204.789.242,93	1.090.319.370.020,37	89,26%
7	2019	996.134.980.759,26	1.125.649.491.486,73	88,49%
8	2020	909.278.952.540,00	1.035.060.933.751,88	87,85%
9	2021	930.841.852.567,00	1.036.178.099.032,34	89,83%
10	2022	959.001.280.743,00	1.076.255.034.975,88	89,11%
11	2023	1.046.739.513.501,00	1.196.988.838.933,90	87,45%
<b>Rata-rata</b>		<b>902.739.449.033,73</b>	<b>1.013.908.990.906,50</b>	<b>88,84%</b>

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pendapatan transfer yang diperoleh Kabupaten Mamuju cenderung fluktuatif, hal itu dikarenakan besaran dana transfer yang diberikan juga dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah terkait. Selain itu rata-rata proporsi Pendapatan Transfer pada tahun 2013 - 2023 juga menunjukkan persentase yang sangat signifikan besarnya yakni sebesar 88,84%. Besarnya nilai persentase proporsi tersebut menandakan Pemerintah Kabupaten Mamuju masih sangat bergantung terhadap dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi guna membiayai kegiatan pemerintahannya.

**c. Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Mamuju**

Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Semakin tinggi nilai IKF maka menandakan tingkat kemandirian fiskal pada Pemerintah Daerah tersebut semakin mandiri, namun sebaliknya apabila nilai IKF yang diperoleh rendah maka Pemerintah Daerah tersebut belum mandiri.

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.1 diatas, Kabupaten Mamuju selama sepuluh tahun terakhir masih masuk kedalam kategori Kabupaten yang belum Mandiri, apabila dirata-rata nilai IKF yang diperoleh sebesar 0,07005 dimana untuk mencapai klasifikasi diatasnya masih cukup sangat jauh yakni harus mencapai nilai 0,25 ataupun lebih. Grafik naik dan turunnya nilai IKF digambarkan pada gambar berikut ini:



**Gambar 4.1 Grafik Nilai IKF**

Sumber: Hasil Perhitungan Nilai IKF berdasarkan Data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju TA 2013 – 2023

Gambar di atas menunjukkan nilai IKF Kabupaten Mamuju pada tahun 2013 – 2023 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2014 terjadi peningkatan signifikan dan menjadi nilai IKF tertinggi dengan nilai 0,09026. Hal tersebut terjadi dikarenakan Kabupaten Mamuju pada tahun 2014 mengalami kenaikan PAD sebesar Rp24.394.764.632,41 yang disisi lain perolehan dari Pendapatan transfer mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp180.299.631.442,00. Kemudian di tahun 2015 mengalami penurunan nilai IKF menjadi sebesar 0,06432 yang dikarenakan adanya kenaikan pendapatan transfer yang signifikan sebesar Rp295.900.359.599,00 dan kenaikan PAD yang hanya sebesar Rp3.286.236.308,66. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 grafik nilai IKF mengalami penurunan dan peningkatan yang

tidak signifikan, dan di tahun 2021 nilai IKF mengalami penurunan yang cukup tinggi yakni menjadi sebesar 0,05922. Penurunan nilai IKF di tahun 2021 dikarenakan pada tahun tersebut perolehan PAD mengalami penurunan yang cukup banyak sebesar Rp14.113.252.820,54, penurunan ini terjadi karena pada tahun tersebut Kabupaten Mamuju mengalami bencana alam gempa bumi. Namun dengan upaya baik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju, nilai IKF di dua tahun berikutnya, mengalami peningkatan yang cukup bagus, peningkatan tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat memperoleh pendapatan dari PAD yang selalu mengalami peningkatan yang di tahun 2023 nilai PAD yang diperoleh merupakan nilai/perolehan PAD tertinggi selama sepuluh tahun terakhir.

#### **d. Keterkaitan PAD, Pendapatan Transfer, dan Kemandirian keuangan Daerah**

Pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas dapat diketahui bahwa peranan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah sangat besar, dimana dengan meningkatnya nilai PAD tentunya akan meningkatkan juga nilai IKF yang menunjukkan peningkatan kemandirian keuangan daerah, hal ini tercermin pada nilai IKF di tiga tahun terakhir, dimana dengan PAD yang terus meningkat membuat nilai IKF juga mengalami peningkatan. Selain itu, dengan meningkatnya nilai perolehan PAD juga menunjukkan bahwa Tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju kepada transfer dana pusat maupun provinsi menjadi berkurang. Oleh karena itu, faktor terpenting dalam peningkatan kemandirian keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju adalah meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan, dari beberapa jenis pendapatan daerah, hanya PAD yang berada di dalam kendali pemerintah daerah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: a) Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan. Namun, apabila dibandingkan dengan perolehan pendapatan daerah masih sangat kecil. Hal ini, menandakan Pemerintah Kabupaten Mamuju, belum optimal dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintahannya. b) Pendapatan transfer yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Mamuju cenderung fluktuatif. Hal ini terjadi karena besaran dana transfer yang diterima juga dipengaruhi oleh pemerintah terkait. Besarnya nilai ini, menandakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, masih sangat bergantung pada pendapatan transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat maupun provinsi guna membiayai kegiatan pemerintahannya. c) Indeks Kemandirian Fiskal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju berdasarkan hasil penelitian, masih dikategorikan sebagai daerah “Belum mandiri”. d) Hasil analisis atas tren IKF, terdapat fluktuasi nilai IKF pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, namun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tren menunjukkan peningkatan atau positif. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju memiliki upaya positif untuk meningkatkan perolehan PAD guna mendanai sendiri kegiatan pemerintahannya. Selain itu, dengan meningkatnya nilai perolehan PAD juga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju kepada transfer dana pusat maupun provinsi menjadi berkurang. Oleh karena itu, faktor terpenting dalam peningkatan kemandirian keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju adalah meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan, dari beberapa jenis pendapatan daerah, hanya PAD yang berada di dalam kendali pemerintah daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2011, Oktober 12). Pemerintah Daerah. Kabupaten Mamuju. Diakses dari <https://sulbar.bpk.go.id/kabupaten-mamuju-2/>
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2014). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2013. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2015). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2014. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2016). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2015. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2017). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2018). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2017. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022. Mamuju: BPK RI.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023. Mamuju: BPK RI.
- Halim, A. (2001). Bunga rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP UMP YKPN.
- Halim, A. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, Aldo Leo & Handoyo, Sarwo Edy. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan, Biaya Keagenan, dan Tata Kelola Terhadap Kemungkinan Financial Distress. Universitas Tarumanaga: Jurnal Manajerial dan Kewirahusahaan, 3(2), 287-297.
- Herdiansyah, Haris. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi. Jakarta: Salemba Humanika.

- Hunter, J. S. (1977). *Federalism and fiscal balance: a comparative study*. Canberra: Australian Nasional University Press for Research on Federal Fiscal.
- Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Indonesia. (2022). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kuningan, B. K. (2023, Februari 23). Artikel. Mengenal APBD Lebih Dekat Pendapatan Asli Daerah. Diakses dari <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-apbd-lebih-dekat-pendapatan-daerah>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Taufick, A. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal dan Belanja Modal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**